

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional tidak terlepas dengan hubungan antar negara satu dengan negara lain yang kita sebut sebagai kerjasama. Ada pun jenis-jenis kerjasama dalam Hubungan Internasional, yaitu: Kerjasama Regional, Internasional, Multilateral dan Bilateral. Kerjasama Bilateral merupakan suatu kerjasama yang terjalin di antara dua negara, baik di bidang politik, budaya maupun ekonomi.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang sering melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara di dunia termasuk dengan Singapura. Dalam teori interdependensi menyatakan bahwa hubungan antara dua negara atau lebih yang hubungannya sangat rentan terhadap perilaku negara yang bisa mempengaruhi tindakan negara lainnya. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura tercipta karena saling ketergantungan ekonomi.

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya.² Dalam konsep kerjasama Internasional menyatakan bahwa perlu kerjasama dengan negara lain karena

¹ Ilmu Geografi.com. "Kerjasama Bilateral: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya." Redaksi Ilmu Geografi. <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-bilateral> (diakses 9 April 2020)

² Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, Hal 11

adanya ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura dikarenakan adanya kepentingan pembangunan perekonomian dalam sektor pertanian.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa, termasuk di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan sektor pertanian yang dapat dilihat secara lebih komprehensif, antara lain pertama, sebagai penyedia pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan sosial (*sosio security*), kedua, sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa, ketiga, sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, keempat, sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, kelima, transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan keenam, sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain.³ Dalam teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa setiap negara mempunyai keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam menghasilkan suatu komoditas dibandingkan negara lain. Sektor pertanian mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia dan Singapura dengan cara ekspor impor.

Kerjasama antara Indonesia dengan Singapura yaitu melakukan ekspor-impor komoditas pertanian. Singapura membutuhkan produk Indonesia termasuk produk komoditas pertanian. Ada beberapa produk unggulan yang sering di ekspor ke Singapura. Pada Januari 2011, permintaan buah naga di Singapura selalu dipasok China sedangkan di Indonesia buah naga mudah ditemukan dan

³ Rosihan Asmara Dkk. *Strategi Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian* (Malang: Gunung Samudera, 2014), Hal 1

jarak kirimnya lebih dekat dibandingkan China.⁴ Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah pada 2013, ekspor sayuran ke Singapura mencapai 413,7 ton meningkat dibandingkan 2012 sebesar 44,87 ton. Adapun komoditas buah seperti melon, salak dan papaya selama 2012 hingga 2013 sebesar 1.325,65 ton. Peluang pasar buah dan sayur di Singapura meningkat sejak adanya kesepakatan pemerintah Indonesia dan Singapura pada 2010 yang hasil akhirnya dibentuk *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group* (AWG).⁵ Dalam teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa semua negara akan memetik keuntungan dari perdagangan internasional. Indonesia melihat besarnya peluang ekspor komoditas pertanian ke Singapura, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Target peningkatan volume ekspor sayuran dan buah Indonesia ke Singapura 20% per tahun. Hal itu didasari tingkat konsumsi sayur dan buah di Singapura mencapai 100 kilogram/tahun/orang. Singapura sebagai *benchmack* sayur dan buah untuk ekspor.⁶ Untuk mendukung keberhasilan ISAWG, Pemerintah Indonesia memilih beberapa provinsi yang ditargetkan mampu menumbuhkan tanaman yang dapat diekspor ke Singapura. Salah satu provinsi tersebut adalah Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS (2013) mencatat bahwa Jawa Tengah memiliki pendapatan ekspor sebesar USD 411,18 juta pada Januari 2013, turun sebesar USD 24,61 juta (5,65%) dari pendapatan pada bulan Desember 2012 sebesar USD 435,79 juta. Namun ekspor ke Singapura meningkat menjadi USD 23,09 juta, lebih tinggi daripada Desember 2010. Kenaikan nilai ekspor ke Singapura terkait dengan permintaan produk pertanian seperti terong, salak, paprika merah dan hijau, papaya dan kacang hijau.⁷ Dalam teori keunggulan

⁴ Antara News.com. "Ketergantungan Singapura Terhadap Produk Indonesia Tinggi." Tekno. <https://www.antaranews.com/berita/242894/ketergantungan-singapura-terhadap-produk-indonesia-tinggi> (diakses 9 April 2020)

⁵ Bisnis.com. "10% Sayur dan Buah Jarteng Diekspor ke Singapura." Ekonomi Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20141222/12/385131/10-sayur-dan-buah-jarteng-diekspor-ke-singapura> (diakses 9 April 2020)

⁶ Ibid

⁷ Denada Faraswacyen L. Gaol dan Rusdiyanta. "Model Pengembangan Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Pangan." *Politics and International Studies* Volume 1, No. 1 (2017), <http://jurnal.fisipunjia.ac.id/index.php/POLITIS/article/view/21/16>

komparatif menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen antar negara. Kenaikan nilai ekspor terhadap permintaan komoditas pertanian mampu menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja para petani dalam menghasilkan produk pertanian.

Perkiraan kebutuhan sayur dan buah di Singapura mencapai 400.000 ton per tahun dengan estimasi pendatang baru sebanyak 13 juta orang per tahun. Pada Agustus 2017, Indonesia mengekspor bawang merah ke Singapura sebanyak 247,5 ton atau 9 kontiner. Kegiatan ekspor bawang merah membuat bangga, karena telah mengubah imaji Indonesia dari sebelumnya pengimpor bawang merah menjadi pengeksport bawang merah.⁸ Dalam konsep kerjasama internasional menyatakan bahwa hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Perubahan imaji Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa adanya kerjasama Internasional baik bilateral maupun multilateral mampu merubah kegiatan suatu negara yang awalnya sebagai pengimpor tetapi sekarang menjadi pengeksport.

Peneliti mengangkat permasalahan ini dikarenakan besarnya keinginan peneliti terhadap kerjasama Indonesia-Singapura dalam ekspor-impor komoditas pertanian serta peluang dan tantangan apa yang akan di terima Indonesia dan Singapura dengan melakukan kerjasama tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian tentang impresi di lakukannya kerjasama terhadap peningkatan perekonomian Indonesia-Singapura. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk di lakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Ekspor-Import Komoditas Pertanian 2013-2018.”

⁸ Detik Finance. “RI Ekspor 247 Ton Bawang Merah ke Thailand dan Singapura.” Berita Ekonomi Bisnis. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3618403/ri-ekspor-247-ton-bawang-merah-ke-thailand-dan-singapura>, (diakses 9 April 2020)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peluang dan tantangan hubungan kerjasama ekspor-impor komoditas pertanian Indonesia-Singapura dari tahun 2013-2018?
2. Impresi apa yang terjadi setelah dibentuknya *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG)?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka peneliti perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas kerjasama Indonesia-Singapura dalam ekspor-impor komoditas pertanian.
2. Data yang dibahas tahun 2013-2018.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia-Singapura dalam ekspor-impor komoditas pertanian 2013-2018.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan kerjasama antara Indonesia-Singapura.
2. Untuk mengetahui produk pertanian apa saja yang di ekspor-impor Indonesia-Singapura.

3. Untuk mengetahui pengaruh kerjasama terhadap perekonomian Indonesia-Singapura.
4. Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan ekspor-impor antara kedua negara.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam proses menganalisa masalah dan mencari jawaban masalah, penelitian ini mengacu kepada literatur dan penelitian terdahulu yang relevan menjadi bahan acuan. Selain itu, literatur penelitian ini akan menunjukkan perbedaan hasil temuan yang sudah ada dengan temuan yang berusaha dijelaskan dalam penelitian ini. Literatur pertama yang menjadi acuan adalah penulis melihat dari beberapa penulis sebelumnya dalam tulisannya yang berjudul “Model Pengembangan Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Pangan” oleh Denada Faraswacyen L. Gaol dan Rusdiyanta, tulisan tersebut menjelaskan bahwa sejak pembentukan ISAWG 2010, pertemuan tingkat menteri (*ministerial meeting*) secara rutin dilakukan oleh Indonesia-Singapura dengan tujuan terus memantau kemajuan dan konsistensi kerjasama sesuai target awal pembentukan.

Secara umum, realisasi ISAWG tersebut dibagi tiga yaitu: 1) meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam produk hortikultura. Upaya ini dilakukan dengan prioritas dan fokus pengembangan tiga provinsi sebagai sumber produk hortikultura yang akan di ekspor ke Singapura yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas buah dan sayuran. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan tiga pihak yaitu peneliti, petani dan pemerintah. Peneliti menciptakan teknologi untuk perbaikan mutu produk hortikultura, petani menerapkan teknologi tersebut dengan mendapatkan pelatihan/training, serta pendidikan formal bidang pertanian, dan terakhir peran pemerintah memberikan bantuan dana, alat pertanian, dan akses pemasaran ke

pasar Singapura. 3) memperkuat kerjasama antara eksportir Indonesia dan importir Singapura.⁹

Fauzan Romadlon, Jirachai Buddhakulsomsiri, Parthana Parthanadee and Warut Pannakkong (2015) dalam tulisannya “*Logistics Cost Estimation and Analysis For Exporting Green Bean From Indonesia To Singapore*” menjelaskan bahwa aktivitas yang terjadi pada kacang hijau menjadi rantai pasokan untuk mengekspor dari Indonesia ke Singapura. Suplai rantai memiliki banyak kepentingan dari berbagai pihak termasuk petani, kelompok petani, pemerintah, eksportir, grosir, konsumen lokal dan pelanggan asing. Ditemukan bahwa biaya panen adalah biaya tertinggi di tingkat petani, biaya penanganan bahan di tingkat kolektor dan biaya administrasi di tingkat eksportir.

Di tingkat petani, biaya panen merupakan biaya tertinggi. Biaya panen dapat dikurangi dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam praktek panen dan memperbaiki pola pertanian seperti penjadwalan perkebunan. Selain itu, kerugian selama kegiatan pemanenan akan lebih rendahnya jumlah kebutuhan kacang hijau berkualitas tinggi yang dapat diperoleh petani. Dalam beberapa kasus, petani melakukan kegiatan pemanenan yang tidak tepat, seperti salah memetik dan memasukkan kacang hijau ke dalam kotak secara sembarangan. Petani juga dapat meningkatkan hasil dengan menggunakan pupuk dan pestisida yang tepat dan mengurangi penggunaan pembibitan kedua yang tidak terbukti meningkatkan hasil.

Untuk pengepul atau kelompok tani, mereka harus mengatur kapan petani harus menanam kacang hijau. Hal ini untuk mencegah jumlah kacang hijau yang berlebihan pada saat puncak panen. Walaupun eksportir memiliki *cold storage* untuk pengawetan, namun mereka tetap memperhatikan keberadaan kacang hijau dan menjaga agar kacang hijau selalu segar dan kondisinya dapat diterima sesuai kebutuhan importir. Selain itu, kelompok tani sebagai pengumpul dapat

⁹ Denada Faraswacyen L. Gaol dan Rusdiyanta. “*Model Pengembangan Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Pangan.*” *Politics and International Studies* Volume 1, No. 1 (2017), <http://jurnal.fisipunjia.ac.id/index.php/POLITIS/article/view/21/16>

menyampaikan saran dari petani kepada pemerintah atau eksportir agar dokumen ekspor juga diproses pada akhir pekan.

Di tingkat pemerintah, mereka harus memberikan saran tentang teknologi di bidang pertanian dan memberikan akses ke sumber investasi seperti pemberian pinjaman lunak kepada petani. Selain itu, pemerintah harus tetap memberikan subsidi benih, pupuk, dan pestisida. Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada petani untuk melakukan aktivitas panen dan penanganan material yang lebih baik, terutama untuk meminimalkan kerugian dan kerusakan produk sebelum dikirim ke pengepul dan eksportir seperti menyediakan keranjang atau paket yang baik untuk panen.

Di tingkat eksportir, mereka harus berkoordinasi dengan kelompok tani dalam mengatur jadwal perkebunan untuk menstabilkan inventaris mereka. Ini karena persediaan mereka biasanya meningkat pada puncak waktu panen ketika mereka harus membeli semua kacang hijau dari petani. Untuk itu, eksportir harus mendorong petani untuk melakukan tumpang sari. Selain itu, pengumpul harus mengembalikan kacang hijau yang ditolak kepada petani, sehingga mereka dapat menjual kacang hijau ke pasar lokal dengan harga yang lebih murah. Hal ini harus dilakukan karena kacang hijau yang ditolak dibuang oleh eksportir meskipun sudah dibeli oleh eksportir. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah dari biji hijau yang ditolak adalah membuat kacang hijau kering, khususnya untuk perusahaan pengolahan makanan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.¹⁰

1.5.2. Kerangka Teori

Ada beberapa konsep dan teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan efisiensi pembentukan kerjasama internasional dalam kaitannya dengan kerjasama Indonesia-Singapura dalam ekspor impor komoditas pertanian. Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai berikut:

¹⁰ Fauzan Romadlon. Thesis: *“Logistics Cost Structure For Exporting Green Bean From Indonesia To Singapore”* (Thailand: Thammasat University, 2014)

a. Kerjasama Internasional

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa ini, sangat efisien rasanya menggunakan konsep kerjasama internasional dalam penelitian ini, karena semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Dari pengaturan substansinya, dapat dibedakan dalam dua kategori berupa *Law Making Treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *Treaty Contracts* mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong *Treaty Contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional.

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian internasional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Dengan kata lain, perlu ada suatu pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*) untuk menerapkan isi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia. Mieke Komar Kantaarmadja mengemukakan bahwa:

“...Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya...”

Terkait kewajiban untuk melakukan transformasi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional karena adanya tujuan perjanjian internasional yang berkategori *law making* untuk merubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa perjanjian internasional yang bersifat *law making* maka negara memiliki kewajiban untuk menterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.

Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita, mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

*“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.*¹¹

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konskuensi-konskuensi yang harus ditanggung. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat

¹¹ Kalevi Jaakko Holsti. 1983. *International Politics: A Framework For Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.

mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.¹²

b. Konsep Hubungan Diplomatik

hubungan diplomatik dapat dipahami sebagai hubungan antar negara yang menggunakan instrumen perlengkapan negara yang dikenal juga dengan perutusan atau perwakilan negara atau lebih familiar dikenal sebagai perwakilan diplomatik. Banyak bidang-bidang yang menjadi dasar untuk setiap negara melakukan kerjasama dan hubungan-hubungan yang bersifat multilateral maupun bilateral, dalam menunjang kepentingan negaranya masing-masing. Dasar hubungan diplomatik antar negara secara internasional mengacu pada *Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik*, yang didalamnya terdiri atas Mukadimmah, 2 Protokol serta 53 Pasal.¹³

Hubungan diplomatik sebagai suatu lembaga yang bermaksud untuk bernegosiasi dengan negara lain sebagai pencapaian suatu tujuan adalah sama tuanya dengan sejarah. Hubungan diplomatik akan terus berkembang kepada kebutuhan suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan dewasa ini telah berkembang menjadi hubungan yang lebih luas antara satu negara dengan negara lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap hubungan antar negara yang diiringi dengan perkembangan anggota masyarakat internasional. Lembaga perwakilan diplomatik sedikit mengalami kemajuan dalam masyarakat, ketika secara relatif hubungan ekonomi dan politik meluas diantara negara-negara yang telah ada dan merdeka. Maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Status dari perwakilan diplomatik telah mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman lampau yaitu bangsa-bangsa kuno. Meskipun belum

¹² Zulkifli. "Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)" (Universitas Indonesia, 2012), 17-21

¹³ Arif Apriadi. "Kedudukan Hubungan Diplomatik Antar Negara Dalam Perizinan Hak Lintas Terbang Atas Negara Lain". <https://core.ac.uk/download/pdf/229622311.pdf> (diakses 21 November 2020)

dikenal adanya hukum internasional yang modern, namun duta-duta besar diberikan perlindungan khusus dan hak-hak istimewa tertentu.¹⁴

c. Teori Interdependensi

Kemunculan dari teori interdependensi ini secara diakronis merupakan tanggapan terhadap kelemahan-kelemahan teori sebelumnya yaitu teori realis. Sejak dikenalnya konsep negara bangsa (*nation state*) sebagai hasil dari perjanjian Westphalia (1648) teori realis ini mendominasi setiap analisis politik internasional. Sampai dengan kelahiran sejumlah negara-negara baru sejak usainya Perang Dunia ke II teori realis pun masih dianggap memadai untuk menjelaskan realita agenda politik dunia. Namun pada masa-masa berikutnya asumsi-asumsi dasar teori ini sudah tidak relevan lagi, bahkan dinilai dapat menyesatkan.

Bagi pandangan interdependensi, karena terjadinya revolusi teknologi transportasi dan komunikasi internasional, negara tidak lagi penting sebagai penjaga gerbang arus transaksi antara intersocietal dan extrasocietal, dan selanjutnya pemisahan yang kaku antara ruang domestic dan internasional menjadi tidak memadai. Dengan demikian kedaulatan yang menjadi simbol keutuhan dan kekuatan tertinggi negara lebih merupakan sebuah fiksi legal dan karakteristik yang askriptif daripada suatu yang deskriptif dan empirik.

Para penganjur teori interdependensi ini juga dengan tegas mengecam asumsi-asumsi pokok yang dilontarkan oleh teori realis. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan duet ilmuwan Keohane dan Nye yang menyatakan:

“We live in era interdependence. This vague phrase expresses a poorly understood but widespread feeling that the very nature of world politics is

¹⁴ Sanwani, Mohd. 1992. Hukum Internasional (suatu pengantar), Medan: Kelompok Studi Hukum & Masyarakat, Hal 68.

changing. The power of nations – that age – old touchstone of analyst and statesman – has become more elusive: calculation of power are even more delicate and deceptively than in previous age”. (Stanley Hoffmann, dalam Keohane and Nye, 1989:3).

Dalam pengertian yang sangat sederhana, interdependensi diartikan sebagai *mutual dependence*. Tetapi sebagai konsep analisis politik internasional *interdependence* menunjukkan suatu situasi yang ditandai oleh efek resiprokal diantara negara-negara atau aktor-aktor yang bukan negara dari negara yang berbeda. Efek resiprokal merupakan biaya, hasil atau akibat dari transaksi internasional. Karenanya saling ketergantungan (*interdependence*) tidak sama dengan saling keterkaitan (*interconnectedness*). Efek interaksi pada interdependensi tergantung pada berbagai hambatan atau biaya yang terkait dengannya. Apabila terdapat *reciprocal costly effects of transactions* diantara pelaku-pelaku internasional, maka terjadilah interdependensi. Sebaliknya apabila tidak terjadi efek biaya yang tidak berarti (*significantly effects*) maka yang terjadi adalah keterkaitan (*interconnectedness*).

Kalkulasi mengenai *cost and benefit* serta *political adjustment* dapat dijadikan sebagai bagian dari hukum-hukum interdependensi. Dengan kata lain interdependensi berlangsung ditengah dan dipengaruhi serangkaian aturan, norma, prosedur dan harapan yang menuntun aktor-aktor dan mengendalikan akibat-akibatnya. Inilah berikutnya yang disebut dengan “International Regime”. Donald Phucala dan Raymond Hopkins mengatakan bahwa rezim selalu eksis dalam setiap area isu hubungan internasional. Dimanapun terjadi perilaku yang regular, beberapa bentuk prinsip, norma atau aturan harus ada untuk mengaturnya. Krasner juga memberikan pengertian terhadap rezim internasional dengan mengatakan *regime as implicit or explicit principles, norms, rules and decision making procedure around which actors expectations coverge in a given area of international relations*. Dalam membicarakan rezim dalam hubungan internasional akan nampak bahwa “integrasi global” dan rezim internasional yang spesifik akan berpengaruh sangat penting terhadap hubungan interdependensi

dimana didalamnya terlibat sejumlah aktor negara dan non-negara. Dengan demikian, tidaklah berlebihan bagi kita untuk mengikuti pendapat Keohane dan Nye yang menempatkan rezim internasional sebagai variable (*intermediate factor*) antara struktur kekuasaan dan perilaku aktor-aktor mengenai suatu isu internasional. Maka dari itu dapat dikemukakan bahwa analisis interdependensi diindikasikan oleh:

1. *Multiple channel connect societies*, termasuk didalamnya hubungan informal antara elit-elit pemerintah seperti halnya pelaku kebijaksanaan luar negeri, hubungan informal antara elit-elit non pemerintah seperti hubungan *face to face* melalui telepon dan organisasi transnasional.
2. *The agenda of interstate relationships consists of multiple issues are not arranged in a clear or consistent hierarchy*. Absennya hirarki diantara isu-isu ini mengandung arti bahwa isu-isu militer dan keamanan nasional bukan lagi isu yang mendominasi agenda.
3. *Military force is not used by goverments toward other governments within the region, or on the issues, when complex interdenpedence prevails*. Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan militer tidak lagi relevan untuk menyelesaikan permasalahan dalam isu-isu ekonomi diantara aktor-aktor yang terlibat.

Ketiga indikasi diatas akan bermanfaat bagi kita dalam menganalisis politik internasional pasca perang dingin dan menyediakan landasan bagi pembentukan tatanan internasional masa depan.¹⁵

d. Teori Integrasi Ekonomi

Istilah “integrasi” dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi dalam suatu industri sebagaimana dikemukakan oleh Machlup. Integrasi digunakan untuk menggambarkan kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industri baik secara vertical maupun horizontal.

¹⁵ | Nyoman Sudira dan Budi Winarno “Tinjauan Kritis Terhadap Realisme Politik dan Relevansinya Terhadap politik Internasional Pasca Perang dingin,” *BPPS-Universitas Gajah Mada*, No. 10 (1A) (1997), <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3.pdf>

Kemudian, istilah integrasi ekonomi dalam konteks negara, yang menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan, diawali dengan kemunculan teori *Custom Union* (CU) oleh Viner. Namun, batasan definisi yang baku tentang integrasi ekonomi diantara para ekonom belum juga ditemukan hingga saat ini. Para ekonom mengembangkan berbagai definisi mengenai integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu sama lain.

Di tengah perbedaan tersebut, Jovanovic (2006) dengan ringkas telah mendokumentasikan berbagai definisi integrasi yang berkembang hingga saat ini, antara lain definisi dikemukakan oleh Timbergen, Balassa, Holzman, Kahneett, Serta Menis dan Sauvant. Timbergen membedakan definisi integrasi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi (*negative integration*) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan pada lembaga bersama (*positive integration*). Pada sisi lain, Balassa membedakan integrasi sebagai konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Sementara Holzman menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi dimana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai dengan harga barang dan faktor produksi yang sama diantara dua kawasan tersebut. Definisi tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam pergerakan barang, jasa dan faktor produksi di antara dua kawasan dan adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut.¹⁶

e. Teori Keunggulan Komparatif

Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817, Ricardo dalam penjelasannya menggunakan Portugal dan Inggris sebagai contoh. Meski tenaga kerja Portugal lebih produktif baik dalam produksi anggur maupun pakaian, Ricardo menunjukkan bahwa bila Inggris melakukan

¹⁶ Winantyo, R dkk. 2015. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN Di Tengah kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hal 25.

spesialisasi dalam produksi dan ekspor pakaian sementara Portugal anggur, kedua negara mampu memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada kondisi (autarki) sebelumnya. Spesialisasi produk suatu negara dalam komoditi tertentu dilandasi oleh “keunggulan komparatif” yang dimiliki negara tersebut. Keunggulan komparatif tersebut berasal dari perbedaan kemampuan teknologi antar negara. Berbeda dengan pandangan teori lain yang umumnya menyatakan bahwa perdagangan internasional tidak selalu mendatangkan keuntungan. Ricardo sebaliknya yakin bahwa semua negara akan memetik keuntungan dari perdagangan internasional. Keuntungan itu bahkan juga diperoleh oleh negara yang mempunyai kemampuan teknologi lebih rendah secara mutlak (absolute) di semua sektor ekonomi daripada negara mitra dagangnya.

Teori keunggulan komparatif Ricardo dibangun dengan sejumlah asumsi yaitu: (i) dua negara masing-masing memproduksi dua jenis komoditi dengan hanya menggunakan satu faktor produksi, tenaga kerja, (ii) kedua komoditi yang diproduksi bersifat identik (homogen) baik antara industri maupun antar negara, (iii) komoditi tersebut juga dapat dipindahkan antar negara dengan biaya transportasi nol, (iv) tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara, (v) tenaga kerja dapat bergerak antar industri dalam suatu negara namun tidak antar negara, (vi) pasar barang dan pasar tenaga kerja dikedua negara diasumsikan dalam kondisi persaingan sempurna, (vii) perusahaan-perusahaan dikedua negara diasumsikan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, sementara tujuan konsumen (tenaga kerja) adalah memaksimalkan keputusan (*utility*).¹⁷

1.5.3. Hipotesis

Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang erat dan produktif mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan guna menunjang upaya

¹⁷ Aryaji, Susanti. 2004. *Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hal 18-19.

pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia. Terdapat komplementaritas kepentingan diantara kedua negara. Di satu pihak, Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan untuk pembangunan Indonesia. Jika kerjasama Indonesia dan Singapura dalam ekspor impor komoditas pertanian di latar belakang karena Singapura dengan keterbatasan sumber daya alam yang pada akhirnya selalu mengimpor produk komoditas pertanian di beberapa negara dunia termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris masih mengimpor beberapa produk dari Singapura seperti komputer, hasil olahan minyak dan perangkat sirkuit. Target peningkatan volume ekspor sayuran dan buah Indonesia ke Singapura 20% per tahun. Hal itu didasari tingkat konsumsi sayur dan buah di Singapura mencapai 100 kilogram/tahun/orang. Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang menjadi negara pemasok produk pertanian ke Singapura, China juga menjadi salah satu negara pemasok buah dan sayur ke Singapura. Maka berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang pangsa pasar Singapura yang tinggi dalam memenuhi permintaan produk pertanian ke Singapura dan tantangan yang akan dihadapi terkait minimnya sumber daya manusia di bidang pertanian serta menjaga kualitas produk dan biaya untuk bersaing dengan China dalam menguasai pangsa pasar Singapura. Sedangkan dari Singapura, peluang yang akan didapatkan yaitu bisa memenuhi kebutuhan buah dan sayur dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dari China. Tantangan yang akan di hadapi Singapura yaitu ketergantungan kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group (ISAWG) merupakan forum kerjasama agribisnis Indonesia dengan Singapura yang dibentuk pada tahun 2010. Forum kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas buah dan sayuran melalui penguatan kerjasama antara eksportir Indonesia dan importir Singapura. Melihat keterbatasan wilayah Singapura, Indonesia menemukan peluang besar untuk memajukan pertanian dengan mengeksport hasil pertanian. Jika Indonesia dan Singapura sepakat membentuk forum kerjasama agribisnis yang dikenal dengan *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group*

(ISAWG) yang dibentuk pada tahun 2010, maka impresi adanya ISAWG diharapkan bisa memberikan peluang yang besar bagi kedua negara dan meminimalisir kendala yang nantinya akan terjadi seiring dengan proses berjalannya kerjasama ini. Sehingga kerjasama antara Indonesia dan Singapura bisa membuat hubungan kerjasama yang terjalin lebih erat.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum, Penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sugiyono, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada BAB ini merupakan pendahuluan yang harus dipenuhi dalam penulisan ilmiah meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. INDONESIA-SINGAPORE AGRIBUSINESS WORKING GROUP (ISAWG)

Pada BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai sejarah *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG), latar belakang kerjasama Indonesia-Singapura dalam komoditas pertanian, Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura sebelum terbentuknya *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG) dan manfaat terbentuknya *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG).

BAB III. PELUANG DAN TANTANGAN HUBUNGAN KERJASAMA EKSPOR IMPOR KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA-SINGAPURA 2013-2018

Pada BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai hubungan kerjasama ekspor impor komoditas pertanian Indonesia-Singapura 2013-2018, tantangan kerjasama ekspor impor komoditas pertanian Indonesia-Singapura 2013-2018 dan peluang kerjasama ekspor impor komoditas pertanian Indonesia-Singapura 2013-2018.

BAB IV. IMPRESI SETELAH DIBENTUKNYA INDONESIA- SINGAPORE AGRIBUSINESS WORKING GROUP (ISAWG)

Pada BAB ini penulis akan menganalisis pengaruh ISAWG terhadap kerjasama Indonesia-Singapura, evaluasi terbentuknya ISAWG dan pencapaian ISAWG tahun 2019-2020.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.

2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.